

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

03 April 2023

NTB

Pemprov Jadi Pemda Ke-4 Serahkan LKPD 2022 ke BPK Perwakilan NTB

Editor: Rury Anjas Andita  3 April 2023



SERAHKAN LAPORAN: Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah saat berada di Gedung BPK untuk menyerahkan LKPD unaudited tahun anggaran 2022. (Diskominfo NTB untuk Lombok Post)

MATARAM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB mulai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB Tahun 2022. "Laporan unaudited dari pemprov sudah kami terima," kata Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana.

Pemprov merupakan pemerintah daerah ke-4 di Provinsi NTB yang menyerahkan LKPD 2022 unaudited ke BPK NTB. Adapun tiga pemda yang lebih dulu memberikan LKPD adalah Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Ade mengatakan, pemeriksaan yang akan dilakukan terdiri dari beberapa aspek. Seperti penyajian laporan yang sesuai dengan penyajian dan standar pemeriksaan keuangan negara. "Dengan penyerahan LKPD ini, akan mempermudah BPK melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, penyerahan LKPD tahun anggaran 2022 merupakan bentuk tanggung jawab pemprov kepada masyarakat, terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban satker untuk pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel," kata Rohmi.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, pemprov telah 11 kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian tersebut disebutnya tidak mudah. "Lebih sulit kita pertahankan ketimbang dapat WTP pertama. Karena kalau bicara mempertahankan, itu soal konsistensi," ujarnya.

WTP yang ke-11 merupakan kontribusi seluruh OPD. Terutama dalam membenahi sistem pengendalian internal, tata kelola keuangan daerah, tata kelola aset daerah, hingga tindak lanjut atas LHP BPK.

Lima tahun terakhir gubernur maupun wakil gubernur terus mendorong pembenahan sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan program. Caranya melalui penerapan manajemen risiko, akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset.

Seluruh upaya tersebut juga dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui monitoring center for prevention (MCP). Meliputi penataan akuntabilitas aset dan keuangan; perencanaan; perizinan; manajemen kepegawaian; tata kelola pendapatan daerah; hingga peningkatan kapabilitas APIP.

"Tentu masih butuh penyempurnaan, itu yang akan kita lakukan terus menerus," sebut Ibnu. **(dit/r5)**